

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata skor dan persentase jawaban responden serta pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan secara seksama pada bab sebelumnya dapat ditarik simpulan penelitian sebagai berikut :

1. Secara umum, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi melalui pembangunan infrastruktur telah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan responden yang menunjukkan angka 65,55% termasuk dalam kategori baik (menurut Koentjaraningrat, 1991: 260). Secara detail, tanggapan responden terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi adalah : (1) tahap perencanaan memperoleh tanggapan responden baik (74,63%); (2) tahap pelaksanaan memperoleh tanggapan responden sedang (47,19%); (3) tahap monitoring dan evaluasi memperoleh tanggapan responden baik (74,84%). Hasil tanggapan responden dari ketiga tahapan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi tersebut yang perlu dicermati adalah pada tahap pelaksanaan yang memperoleh kategori sedang (41 – 60%), sehingga dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang infrastruktur.
2. Hambatan yang berhasil diidentifikasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi adalah kurang terkuasainya metode dan teknik partisipasi oleh masyarakat, sehingga perlu diberikan pelatihan secara lebih sering dalam kegiatan yang sejenis. Selain itu, teridentifikasi juga bahwa pemerintah kelurahan yang masih menganggap masyarakat sebagai obyek pembangunan,

bukan sebagai subyek/pelaku pembangunan sepenuhnya. Jadi, masyarakat tersebut harus diberikan kepercayaan yang lebih luas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelurahan.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kelurahan untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, adalah sebagai berikut : (1) memberikan prioritas bagi pemborong dari masyarakat setempat sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur kelurahan; (2) mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelurahan sebagai pekerja; dan (3) mengefektifkan peran ketua RT dan ketua RW untuk menginformasikan rencana program pembangunan infrastruktur dan melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam proses *monitoring* dan *controlling* terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelurahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi agar melakukan pengkajian dan peningkatan pemahaman tentang prinsip dan tujuan pembangunan infrastruktur kelurahan, termasuk pemberdayaan masyarakat kelurahan.
2. Meningkatkan upaya keterbukaan seperti sosialisasi yang lebih masif, akuntabilitas, dan peran yang lebih nyata sebagai bentuk pelayanan dan keberpihakan terhadap masyarakat.
3. Masyarakat harus bersatu dalam suatu wadah yang terorganisir dan independen sebagai alat mediasi dan penyalur aspirasi dan partisipasi. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan ada kekuatan yang lebih kuat untuk menyampaikan saran dan masukan kepada pemerintah dkelurahan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, *monitoring* dan *controlling* maupun terhadap implementasi kebijakan pemerintah kelurahan.

